PEMENUHAN HAK-HAK ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Nafiatul Fatikah¹, Yanuar Maharani Dwi Jayanti², Bunga Cinta³, Thariq Hanif Muhammad Kautsar⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

nafiatulf16@gmail.com¹, yanuarmaharaniii@gmail.com², bunga03.cinta@gmail.com³,
thariqhanif22@gmail.com⁴

Corresponding Author, e-mail: nafiatulf16@gmail.com

abstrak

Asisten Rumah Tangga merupakan pekerjaan yang sudah tidak jarang lagi didengar. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, maupun kondisi ekonomi. Selain itu, asisten rumah tangga ini dibutuhkan bagi orang yang bekerja terlalu banyak kegiatan hingga tidak adanya waktu untuk mengurus rumah. Oleh karena itu, adanya faktor saling membutuhkan satu sama lain, maka dalam memberlakukan maupun memberikan asisten rumah tangga sesuai dengan hak dan kewajibannya. Menurut pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji upaya optimalisasi hak-hak asisten rumah tangga yang mengalami tindak pidana kekerasan pada saat bekerja. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, teori, asas-asas, serta konsep maupun prinsip yang berdasarkan hukum. Hasil penelitian menunjukkan pada saat ini banyak terjadi kasus penganiayaan maupun kekerasan asisten rumah tangga. Dengan demikian perlu adanya penegakan perlindungan hukum ketenagakerjaan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak asisten rumah tangga.

Kata Kunci: ART, KDRT, Ketenagakerjaan

abstract

Household Assistant is a job that is no longer rarely heard of. This is caused by several factors such as limited employment opportunities and economic conditions. Apart from that, household assistants are needed for people who work too many activities and don't have time to take care of the house. Therefore, there is a mutual need for each other, so implementing or providing household assistants is in accordance with their rights and obligations. According to article 27 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia "Every citizen has the right to work and a living that is worthy of humanity." The aim of the research is to analyze the legal protection for domestic assistants in the employment system in Indonesia and to determine and examine efforts to optimize the rights of domestic assistants who experience criminal acts of violence while working. The method used in this writing is a normative juridical writing method which uses a statutory approach, theory, principles, as well as concepts and principles based on law. The results of the research show that currently there are many cases of abuse and violence against domestic assistants. Thus, it is necessary to enforce labor law protection as a form of fulfilling the rights of domestic assistants.

Keywords: ART, Domestic Violence, Employment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbatasnya lapangan atau prospek pekerjaan, membuat beberapa orang beralih ke berbagai cara lain untuk mencari nafkah. Beberapa orang memulai perusahaan mereka sendiri di berbagai industri, dan yang lainnya mempekerjakan orang untuk melakukan berbagai pekerjaan termasuk tenaga kerja sementara, seperti asisten atau pembantu rumah tangga (ART). Istilah "asisten rumah tangga" atau "pekerja rumah tangga" juga sering digunakan. ART ialah orang yang pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga untuk orang lain, membantu tugas sehari-hari di rumah. Beberapa ART juga tinggal di rumah majikan mereka secara permanen. Jadwal pemberi kerja yang padat membuat mereka sulit membagi waktu antara bekerja untuk menghasilkan uang dan mengurus rumah tangga, sehingga dibutuhkan ART untuk membantu meringankan pekerjaan rumah tangga mereka. Sistem pemberian gaji asisten rumah tangga juga beragam, ada yang menyelesaikan tugasnya akan langsung diberikan upah dan juga pemberian gaji diakumulasi setiap bulan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Bahkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga sangat terkenal di Indonesia, dan bahkan banyak dari pekerja ART yang melakukan pekerjaannya sampai di luar negeri.

Istilah "lingkup rumah tangga" pada Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) merujuk pada profesi asisten rumah tangga, yang didefinisikan menjadi "tiap orang yang menetap pada rumah tersebut dengan melakukan pekerjaan untuk membantu pekerjaan rumah tangga". Namun, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa, "selama ia menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan, orang yang melakukan pekerjaannya seperti yang telah disebut dalam huruf (c) dianggap sebagai anggota keluarga". Penegasan yang disebutkan di atas tidak membahas kesulitan yang berkaitan dengan pekerjaan, oleh karena itu diperlukan aturan dan peraturan lain untuk mengatur hubungan kerja antara rumah tangga.

Setiap warga negara pada dasarnya dijamin haknya guna memiliki pekerjaan yang layak dalam lingkup kemanusiaan, serta memiliki hak untuk diperlakukan adil dan diberikan upah dalam hal hubungan kerja, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2). Klausul ini memiliki dampak hukum yang mewajibkan pemerintah untuk mematuhi standar hukum dasar jika dikaitkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan dalil bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Ironisnya, ART tak diakui sebagai bagian dari tenaga kerja di Indonesia seperti halnya pekerja lainnya, seperti yang dipekerjakan oleh pabrik, bisnis, dan perusahaan lainnya. Akibatnya, sektor informal termasuk di dalamnya adalah ART. Ekonomi tidak resmi, yang mempekerjakan ART dan pekerja rumah tangga lainnya, sarat dengan pelecehan dan kekerasan.

Hak serta kewajiban pekerja dituangkan dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, namun hanya mencakup pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan atau organisasi. Sehingga, profesi asisten rumah tangga tidak tercakup dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak dapat dilindungi oleh UU tersebut. Peraturan Menteri, khususnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, adalah satu-satunya regulasi hukum yang memberikan perlindungan bagi pekerja dalam lingkup rumah tangga.

Pengaturan mengenai tenaga kerja telah mengatur setiap jenis hak yang dimiliki perusahaan terhadap karyawan. Untuk mempertahankan martabat lingkungan yang layak bagi para pekerja, dalam hal ini proteksi pada hak-hak pekerja sangat diperlukan. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga yang dipekerjakan oleh rumah tangga juga harus dilindungi oleh undang-undang perlindungan pekerja. Hal ini penting karena pekerja rumah tangga melakukan pekerjaan mereka di

lingkungan rumah tangga di luar lingkup pengawasan majikan, sehingga sangat perlu adanya pengawasan terhadap pembelaan hak-hak pekerja asisten rumah tangga.

Walaupun demikian, tidak sedikit asisten rumah tangga yang berasal dari lingkungan yang kurang beruntung. Karena tingkat pendidikan dan keterlibatan mereka yang rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka terpaksa bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan pengaruh yang sangat kecil dalam negosiasi. Oleh sebab tersebut, ART kerap kali tak menerima hak-hak selayaknya pekerja yang seharusnya mereka dapatkan sebagai seorang pekerja. Selanjutnya, asisten rumah tangga sering kali tak mempunyai otonomi dalam sebuah pengambilan keputusan kesepakatan, memiliki batasan kebebasan secara fisik, serta menghadapi berbagai tantangan lainnya.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
- b. Bagaimana upaya optimalisasi pemenuhan hak-hak asisten rumah tangga yang mengalami tindak pidana kekerasan pada saat bekerja?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya optimalisasi hak-hak asisten rumah tangga yang mengalami tindak pidana kekerasan pada saat bekerja.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa dilakukannya penelitian yang demikian, diharap dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan literatur tambahan dan tambahan wawasan pemikiran tentang penelitian bidang hukum, terkhusus dalam penelitian yang serupa mengenai perlindungan hukum dan hak-hak asisten rumah tangga.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak asisten rumah tangga, termasuk hak mereka atas upah minimum, jam kerja yang layak, hingga perlindungan terhadap pelecehan seksual. Dalam konteks lebih luas, hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi asisten rumah dapat memberikan perhatian mengenai perlunya kesetaraan dan perlindungan hak bagi semua pekerja, tanpa memandang jenis pekerjaan atau latar belakang pekerja. Hal ini mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial dan hak asasi manusia bagi semua pekerja, sehingga dapat secara efektif mengatasi kerentanan dan penindasan yang dialami oleh kelompok pekerja asisten rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada kajian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Tujuan dari meninjau penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan pengetahuan yang sudah ada, temuan-temuan sebelumnya, dan pendekatan yang telah digunakan oleh para

peneliti sebelumnya. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu diperjelas.

Hasil penelitian terdahulu menjadi referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji diantaranya adalah penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia" oleh Baby Ista Pranoto yang membahas mengenai perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga yang belum spesifik diberikan oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia, masih maraknya kasus yang dialami oleh asisten rumah tangga juga mendesak rancangan undang-undang mengenai perlindungan pekerja rumah tangga untuk segera disahkan.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Reni Yusmita dan Ufran mengenai "Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia". Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga belum secara penuh dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang cipta kerja juga tidak mengkategorikan asisten rumah tangga sebagai kategori buruh secara formal seperti para pekerja lainnya. Perlu adanya pembaharuan hukum untuk dapat memberikan suatu keberpihakan kepada pekerja asisten rumah tangga.

Kemudian penelitian lain yang serupa juga dilakukan oleh Almira Vasthi dan Arinto Nugroho mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti". Selain pembatasan tambahan yang berkaitan dengan keseragaman hak cuti, pekerja rumah tangga juga berhak untuk mempertahankan hak cuti mereka. Penelitian ini mengkaji kebijakan cuti terbaik bagi pekerja rumah tangga menguji perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak cuti mereka. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang tidak disebutkan dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, tidak mengatur lebih lanjut mengenai hak cuti bagi PRT. PRT berhak atas cuti kerja yang ideal, namun karena mereka adalah pekerja informal, maka cuti kerja yang ideal tidak dapat disamakan dengan cuti kerja yang dimiliki oleh pekerja resmi yang dipekerjakan di Inggris. Ada perbedaan dalam tugas dan hak pekerja rumah tangga.

B. Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan pada penulisan ini ialah metode penulisan yuridis normatif. Metode penulisan yuridis normatif merupakan metode penulisan yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan, teori, asas-asas, serta konsep maupun prinsip yang berdasarkan hukum. Selain itu, juga menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan untuk penyusunan analisis yang dibenturkan dengan prinsip-prinsip berdasarkan hukum dengan data informasi baik dari artikel jurnal, buku, berita, serta referensi lainnya yang mendukung dalam penulisan ini.

BAB III ANALISIS

A. Hasil

Belum adanya perlindungan adanya regulasi yang lebih spesifik melindungi pekerja rumah tangga bisa mengakibatkan kurangnya perlindungan hak-hak pekerja. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak secara khusus menyebut asisten rumah tangga, yang mengindikasikan bahwa undang-undang ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Karena tidak ada undang-undang yang eksplisit, pekerja rumah tangga masih dapat mengalami masalah dengan hak-hak ketenagakerjaan mereka. Sangatlah penting bagi pemerintah Indonesia untuk

mempertimbangkan untuk membuat undang-undang khusus untuk meningkatkan perlindungan hak-hak bagi pekerja dalam lingkup rumah tangga. Karena tidak ada peraturan yang secara spesifik berlaku, pekerja rumah tangga masih bisa mengalami kesulitan terkait hak-hak ketenagakerjaan mereka. Selain itu, perlindungan bagi pekerja lingkup rumah tangga di Indonesia masih belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik sehari-hari. Hukum yang berorientasi pada perlindungan, seperti yang mengatur upah minimum, jadwal kerja, waktu istirahat, dan perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan, tidak selalu diterapkan. Banyak masalah yang didapat pekerja rumah tangga termasuk jam masuk kerja yang relative panjang, pengupahan yang rendah, dan jaminan sosial yang minim. Kurangnya peraturan yang secara khusus dirancang untuk pekerja rumah tangga juga mengakibatkan kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan hak-hak mereka.

Berbagai jenis kekerasan yang terjadi, terutama yang ditujukan kepada perempuan dan pekerja rumah tangga, tidak diragukan lagi merupakan cerminan dari realitas masyarakat dan menyoroti betapa gentingnya kelompok-kelompok ini dalam masyarakat. Hak-hak pekerja rumah tangga sering kali diabaikan. Karena tidak adanya hubungan antara majikan dan ART, beberapa majikan memperlakukan ART dengan semena-mena dan kurang menghargai hak-hak mereka. Sejumlah kasus yang melibatkan pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, pembunuhan, serta insiden lainnya yang melibatkan nilai-nilai sosial kemanusiaan terjadi karena tindakan sewenang-wenang terhadap pembantu rumah tangga. Dengan demikian, penegakan hukum bisa dimaknai secara sempit dari segi subjeknya sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu sebagai struktur hukum dalam suatu sistem hukum, dalam memastikan dan menjamin suatu aturan hukum dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Hal ini dalam rangka menyelesaikan permasalahan Asisten Rumah Tangga, sebagai korban KDRT, mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Meskipun saat ini terdapat kebutuhan yang besar akan pekerja rumah tangga, namun saat ini tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, banyak pihak yang saat ini menginginkan RUU PPRT untuk disahkan demi melindungi hak-hak PRT, namun RUU PPRT tersebut hingga saat ini belum disahkan.

B. Pembahasan

a. Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Hak-hak pekerja dalam lingkup rumah tangga belum secara eksplisit dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Jo UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Ketenagakerjaan. Hal tersebut banyak terjadi sebab banyak yang beranggapan bahwa PRT berada pada sektor informal atau tidak dianggap sebagai pekerja.

Pemerintah baru saja mengesahkan UU Ketenagakerjaan, sebuah undang-undang baru yang dapat melarang pemerasan dan membatasi penciptaan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru. Banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman dari UU Ketenagakerjaan masih ada dalam UU Ciptaker, meskipun beberapa juga telah diperkenalkan atau dimodifikasi. Mempertimbangkan komitmen negara, asisten rumah tangga juga harus dilindungi secara hukum oleh UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, yang bersama-sama berfungsi sebagai jaring pengaman hukum bagi pekerja dan buruh. Ini adalah jenis kewenangan konstitusional. Undang-undang ini berada di tingkat hukum yang lebih tinggi daripada gabungan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Akan tetapi, undang-undang ini tidak menjamin hasil tertentu dan hanya menawarkan perlindungan hukum kepada pekerja dalam sektor formal.

Hingga pada tanggal 29 Maret 2023, Rancangan mengenai UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih belum diundangkan atau disahkan. Namun, melalui Menteri Ketenagakerjaan pemerintah sudah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yakni No. 2 Tahun 2015 perihal perlindungan pekerja rumah tangga atau PRT pada tanggal 19 Januari 2015. Yang didalamnya memuat: 1. Ketentuan umum; 2. Persyaratan PRT (termasuk hak dan kewajiban pengguna); 3. Pelaporan penyalur PRT; 4. Pembinaan dan pengawasan; dan 5. Sanksi. Ketentuan penutup semuanya diatur oleh Permenaker PPRT.

Persoalan hukum, seperti anggapan bahwa PRT bukanlah pekerja, dan kemungkinan terjadinya kekerasan di tempat kerja ART/PRT menjadi hambatan bagi perlindungan hukum bagi ART/PRT. Dinamika ketidakseimbangan antara kekuasaan, strata sosial ART dan PRT yang dianggap rendah serta minim perhatian, budaya masyarakat, hingga fakta bahwa pekerjaan mereka dianggap tak produktif merupakan contoh faktor sosial. Dengan permasalahan yang demikian, dapat diharapkan para aparat penegak hukum dapat memaksimalkan keterlibatannya dalam pemberian pelayanan dan perlindungan kepada ART.

Hubungan pemberi kerja dengan pencari kerja, terdapat kesepakatan kerja yang standar. Hal ini menunjukkan bahwa, menurut pendapat para ahli hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hubungan pekerjaan pekerja lingkup rumah tangga kepada pengguna jasa adalah hubungan kerja yang memiliki banyak kesamaan dengan hubungan kerja pada umumnya. Hubungan kerja terdiri dari tiga komponen utama: uang, pekerjaan, serta perintah untuk melakukan pekerjaan atau bekerja (di bawah arahan orang lain). Hubungan kerja pekerja rumah tangga dan pengguna jasa mereka terdiri dari ketiga komponen tersebut. Oleh sebab itu, hubungan kerja antara pemberi kerja yakni pengguna jasa pekerja rumah tangga dan pekerja yakni pekerja rumah tangga dianggap dalam hubungan kerja biasa.

Ciri-ciri yang dimiliki oleh pekerja biasa juga berlaku untuk pekerja rumah tangga. Namun, pekerja rumah tangga bukan termasuk kelompok pekerja yang dilindungi oleh UU ketenagakerjaan yang relevan. Pekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga, dikecualikan dari undang-undang ketenagakerjaan. Namun hukum kebiasaan menjunjung tinggi hak-hak hukum pekerja rumah tangga.

Upah yang dibayarkan kepada pekerja rumah tangga adalah masalah lain. Karena tidak memiliki standar, pekerja rumah tangga menghadapi kesulitan dalam mengajukan tuntutan sebab ketidakjelasan peraturan mengenai sistem pengupahan. Selain itu, perlindungan seperti asuransi sosial dan kesehatan tidak diberikan kepada pekerja rumah tangga. Pekerja harus dilindungi oleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek), sesuai dengan ketentuan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasal 164-166 dari BAB XII juga berisi peraturan yang berkaitan dengan keselamatan pekerja. Berlawanan dengan apa yang dinyatakan oleh Permen PPRT, tidak banyak majikan yang benar-benar mengadopsi program jamsostek, meskipun program ini diwajibkan bagi pengguna jasa PRT (majikan). Keengganan majikan untuk menanggung biaya tambahan dan ketidaktahuan kedua belah pihak menjadi penyebabnya.

Jika ada, hal ini berasal dari fakta bahwa penghuni rumah tangga yang bekerja termasuk dalam definisi rumah tangga menurut UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang juga berlaku untuk pekerja rumah tangga. Hal ini mengandung makna bahwa meskipun PRT memiliki perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut belum ditujukan sehubungan dengan pekerjaan mereka sebagai PRT. Hal ini menekankan betapa pentingnya memiliki peraturan khusus yang melindungi pekerja rumah tangga sehubungan dengan pengaturan kerja. Sering kali,

pekerja rumah tangga dianggap hanya sebatas membantu pekerjaan rumah tangga dan bahkan tidak diklasifikasikan sebagai pekerja informal. Meskipun tidak tunduk pada peraturan hukum di Indonesia, PRT pada kenyataannya dianggap sebagai pekerja informal.

Karena pemilik rumah termasuk dalam definisi rumah dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pekerja rumah tangga pun termasuk dalam undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa meskipun pekerja rumah tangga memiliki perlindungan hukum, namun hal ini belum membahas mengenai pekerjaan mereka sebagai pekerja rumah tangga. Hal ini menekankan betapa pentingnya memiliki peraturan khusus yang melindungi pekerja rumah tangga sehubungan dengan pengaturan kerja. Sering kali, pekerja rumah tangga dianggap hanya sebatas membantu pekerjaan rumah tangga dan bahkan tidak diklasifikasikan sebagai pekerja informal. Meskipun tidak tunduk pada peraturan hukum di Indonesia, PRT pada kenyataannya dianggap sebagai pekerja informal.

Pekerja rumah tangga belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Pekerja rumah tangga lebih sering disebut sebagai pembantu daripada pekerja dalam budaya Indonesia. Hal ini dikarenakan pekerja rumah tangga diasumsikan bekerja di sektor ekonomi tidak resmi, yang membuat mereka enggan untuk secara formal mendekati majikan mereka untuk menjalin hubungan kerja. Dalam lingkungan keluarga, keadaan ini mengacu pada pekerja rumah tangga yang tinggal pada rumah yang sama dengan majikannya. Karena sifat informal dari hubungan ini dan fakta bahwa banyak PRT yang berasal dari desa terdekat atau keluarga jauh, majikan memandang pekerjaan mereka sebagai pekerjaan yang bersifat paternalistik, memberikan uang belanja, makanan, tempat tinggal, dan perlindungan kepada PRT sebagai upah atas kerja mereka.

PRT lebih rentan dan tidak dilindungi untuk mendapatkan hak dari majikan karena Undang-Undang tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas. Berbagai masalah yang dihadapi PRT belum diselesaikan oleh peraturan PPRT tentang kontrak kerja, kewajiban PRT, pengusaha, jam kerja, cuti satu minggu, hak untuk dua belas hari cuti tahunan, THR, asuransi kesehatan dan asuransi sosial, kondisi kerja yang layak, dan batas usia minimal untuk PRT. Peraturan ini mencakup juga pengaturan terhadap saluran pekerja rumah tangga (LPPRT), yang berkisar dari izin bisnis hingga konstruksi serta pengawasan.

Karena Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Pekerjaan pada dasarnya tidak memiliki peraturan khusus PRT, dasar hukum PRT tidak dapat sepenuhnya berasal dari undang-undang. Peraturan Menteri Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mencakup peraturan perlindungan khusus PRT; tidak merupakan bagian dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Pekerjaan. Perbedaan antara Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (JARMEN) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai hak-hak PRT (pajak, hak kesehatan dan keamanan, manfaat, hak pensiun, dll.), kewajiban (deskripsi pekerjaan), jam kerja, penyelesaian sengketa, penghentian hubungan kerja, dll. PRT juga diatur ketentuannya oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Keluarga karena PRT mencakup individu yang bekerja sebagai keluarga. Karena itu, PRT memiliki perisai hukum, meskipun tidak terpengaruh jika ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai PRT.

- b. Upaya optimalisasi pemenuhan hak pekerja rumah tangga yang mengalami tindak pidana kekerasan pada saat bekerja

Peraturan dan perundang-undangannya sendiri harus mengatur perlindungan pekerja rumah tangga. Pemerintah bisa mulai memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang tidak dibayar yang pada akhirnya dapat naik ke posisi yang memiliki nilai ekonomi dengan mengesahkan undang-undang. Selain UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permen PPRT, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi PRT secara hukum adalah dengan menggunakan berbagai hukum nasional yang meskipun berbeda, namun tetap dapat memberikan perlindungan kepada PRT. Undang-undang ini meliputi UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara hukum domestik dapat digunakan untuk melindungi secara hukum.

Istilah "lingkup rumah tangga" dalam ketentuan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) mengacu pada profesi asisten rumah tangga, yang didefinisikan sebagai "setiap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut." Pasal 2 menyoroti bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dianggap sebagai anggota keluarga selama menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut yang telah ditegaskan, bahwa belum sepenuhnya merambah mengenai hubungan kerja yang dalam implementasinya belum diatur ketentuannya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai pemberi kerja dan pekerja dalam lingkup hubungan kerja pembantu rumah tangga.

Karena kurangnya sosialisasi UU PKDRT dan meningkatnya kasus KDRT yang menimpa ART, maka perlu adanya peningkatan kesadaran tentang KDRT secara umum. Para ART masih belum menyadari bahwa mereka dapat mengadu ke pihak berwajib jika mereka menjadi korban kekerasan, meskipun sudah ada upaya sosialisasi melalui berbagai media. Meskipun para korban KDRT telah berhasil disadarkan akan masalah ini, namun masih ada masalah lain yang muncul, seperti persepsi bahwa KDRT adalah masalah yang hanya terjadi di dalam rumah tangga. Pengungkapan kasus KDRT, termasuk yang melibatkan ART, dan pembelaan terhadap hak korban ART dimungkinkan dengan adanya UUPKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dulunya dianggap sebagai masalah pribadi yang hanya dapat diakses oleh anggota rumah tangga. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan suatu peraturan pelaksana dari UU PKDRT. Peraturan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses pelaksanaan UU PKDRT sebagaimana berdasarkan mandat UU tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pasal dalam UU PKDRT yang belum berpihak pada perempuan korban kekerasan.

Hal ini memungkinkan untuk mengadvokasi pekerja rumah tangga dengan mengangkat isu-isu mereka, yang akan menghasilkan banyak dukungan dan respon dan pada akhirnya menghasilkan tindakan hukum untuk melindungi mereka. Selain itu, pemerintah memiliki hak untuk segera memberlakukan hukum dan peraturan yang secara khusus dirancang untuk pekerja rumah tangga. Paralegal juga berperan dalam melindungi pekerja rumah tangga dari tindakan dan tekanan majikan dengan memberikan informasi tentang hukum. Organisasi seperti serikat pekerja juga dapat mengambil manfaat dari pembangunan pusat layanan. PRT secara khusus dapat membentuk serikat PRT guna memfasilitasi PRT supaya bisa mengupayakan pemenuhan hak-haknya sebagaimana mestinya. Di samping itu, dalam membantu penanganan PRT yang menjadi korban KDRT, perlu dibangun rumah aman (shelter)

oleh lembaga-lembaga yang fokus pada isu kekerasan. Diperlukan juga peran aktif masyarakat dalam menanggapi dan melaporkan kasus-kasus KDRT yang terjadi di lingkungannya kepada pihak kepolisian.

Selain itu, kondisi kerja yang aman juga harus dijamin. Hal ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual di tempat kerja. Tindakan kekerasan yang mungkin dialami secara langsung oleh asisten rumah tangga seperti hukuman fisik, penyalahgunaan psikologis, atau penahanan upah dengan tidak adil perlu dihindari dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap diskriminasi juga merupakan bagian penting dalam memastikan hak-hak asisten rumah tangga terpenuhi. Mereka harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan hak untuk cuti serta liburan dengan bayaran. Selain itu, akses terhadap jaminan sosial juga sangat penting bagi kesejahteraan mereka. Dengan memastikan penerapan hak-hak ini, dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan selaras dengan aturan atau ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) masih kurang terwujud. Meskipun Permenaker PRT telah mengatur hak dan kewajiban PRT serta perlindungan jaminan sosial, PRT tetap rentan karena hubungan tersebut tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Faktor-faktor penghambat atas perlindungan hukum bagi PRT meliputi aspek yuridis atau hukum yakni anggapan bahwa PRT bukan termasuk pekerja. dan sosial yakni status sosial rendah. Kekurangan perlindungan hukum terhadap PRT menyebabkan masalah pengupahan, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Diperlukan konsistensi antara undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan dengan Permenaker PPRT untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi PRT.

Meskipun UU Nomor 23 tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) telah memungkinkan untuk mengungkap kasus KDRT, termasuk kekerasan terhadap ART, beberapa ketentuan masih mendiskriminasi perempuan yang menjadi korban pelecehan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dalam Pemulihan Korban Kekerasan dalam lingkup rumah tangga khususnya bagi pekerja. Di samping itu, advokasi, peran paralegal, pembentukan pusat pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat juga dianggap penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap ART. Lebih lanjut, pentingnya perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, akses terhadap layanan kesehatan, cuti, liburan, dan jaminan sosial bagi ART juga ditekankan demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Saran untuk peneliti, penting untuk mengeksplorasi perbedaan perlakuan hukum terhadap asisten rumah tangga berdasarkan jenis kelamin seperti perbedaan dalam kondisi kerja antara pekerja rumah tangga pria dan wanita. Saran lainnya adalah mempertimbangkan pandangan dari para pekerja rumah tangga sendiri untuk memahami pengalaman dan kebutuhan mereka dalam konteks perlindungan hukum. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, dapat menyusun penelitian yang komprehensif dan berkontribusi pada pemahaman dan perlindungan yang lebih baik bagi asisten rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, A. (2017). Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 18-25.
- Aritonang, J. M., & Eddy, T. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 791/Pid. B/2015/PN. Mdn). *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 1(1), 106-116.
- Aryawati, L. P. T., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Journal Ilmu Hukum*, 2(02).
- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-hak pekerja rumah tangga dan perlindungan hukum di Indonesia.
- Dayanti, I., & Junawan, J. (2018). IMPEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI HUBUNGAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA. *Hukum Responsif*, 9(2).
- Karo, R. K. (2023). HAK RESTITUSI BAGI ASISTEN/PEMBANTU RUMAH TANGGA (ART/PRT) KORBAN PENGANIAYAAN OLEH MAJIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1), 1-21.
- Kurniadi, A. V. G., & Nugroho, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 111-120.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Pranoto, B. I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(4), 745-762
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Yusmita, R., & Ufran, U. (2023). Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 541-548.